

**PERBEDAAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLIBAT POLITIK DINASTI  
DAN TANPA POLITIK DINASTI DI INDONESIA  
TAHUN 2012-2017**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana**

**Akuntansi (S1)**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Disusun oleh:  
Melieana Putri  
NPM: 16 04 22459**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA,  
JUNI 2020**

**PERBEDAAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLIBAT POLITIK DINASTI  
DAN TANPA POLITIK DINASTI DI INDONESIA  
TAHUN 2012-2017**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana**

**Akuntansi (S1)**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Disusun oleh:  
Melieana Putri  
NPM: 16 04 22459**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA,  
JUNI 2020**

**Skripsi**

**PERBEDAAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLIBAT POLITIK DINASTI  
DAN TANPA POLITIK DINASTI DI INDONESIA  
TAHUN 2012-2017**



**Disusun oleh:  
Melieana Putri  
NPM: 16 04 22459**

**Telah dibaca dan disetujui oleh:**

**Pembimbing**

**Dr. Nuritomo, SE., M.Acc.**

**14 November 2020**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**SURAT KETERANGAN**

**No. 903/J/I**

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Kamis, 10 Desember 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.        | (Ketua Penguji) |
| 2. Dr. Nuritomo, SE., M.Acc.             | (Anggota)       |
| 3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. | (Anggota)       |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Melieana Putri  
NPM : 160422459

Dinyatakan

**Lulus Dengan Revisi**

Pada saat ini skripsi Melieana Putri telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

**Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.**  
FONS DAN EKONOMIKA

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERBEDAAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLIBAT POLITIK DINASTI  
DAN TANPA POLITIK DINASTI DI INDONESIA  
TAHUN 2012-2017**

Benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan serta tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 07 November 2020

Yang menyatakan



Melieana Putri

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya, skripsi yang berjudul “Perbedaan Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terlibat Politik Dinasti dan Tanpa Politik Dinasti di Indonesia Tahun 2012-2017” dapat diselesaikan. Skripsi ini menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam proses pembuatan skripsi ini tak lepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nuritomo, SE., M.Acc, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membagikan ilmunya.
3. Semua staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberika pelayanan dalam perizinan memperoleh data penelitian.
4. Semua keluarga yang telah memberikan dukungan serta doanya.
5. Teman-teman yang turut menyemangati dan membantu dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seseorang yang telah mendukung, mengingatkan, mendoakan dan memberi saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Pembahasan .....	7

## **BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

2.1 Teori Keagenan .....	9
2.2 Politik Dinasti .....	10
2.3 Kinerja Pemda .....	12
2.4 Akuntabilitas Keuangan Pmda .....	14
2.5 Kerangka Konseptual .....	15
2.6 Penelitian Terdahulu .....	16
2.7 Pengembangan Hipotesis .....	19

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Objek .....	21
3.2 Populasi .....	21
3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	21
3.4 Variabel Penelitian .....	22
3.5 Operasionalisasi Variabel .....	23
3.6 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7 Analisa Data .....	25
3.8 Uji Hipotesis .....	26

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	28
4.2 Analisis Uji Deskriptif .....	30
4.3 Uji Normalitas .....	31
4.4 Uji Mann Whitney .....	32



4.5 Pembahasan .....	34
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	39
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	39
5.3 Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>48</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel .....	23
Tabel 4.1. Kabupaten/Kota Sampel Penelitian .....	28
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif EKPPD, IPM, dan Akuntabilitas .....	30
Tabel 4.3. Uji Normalitas EKPPD, IPM, dan Akuntabilitas.....	32
Tabel 4.4. Uji Mann Whitney EKPPD, IPM, dan Akuntabilitas .....	33
Tabel 4.5. Tabel Keputusan Hipotesis .....	34

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1. Tingkat Kesalahan $Ha_1$ dan $Ha_2$ .....	27



**PERBEDAAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLIBAT POLITIK DINASTI  
DAN TANPA POLITIK DINASTI DI INDONESIA  
TAHUN 2012-2017**

**Disusun oleh:**

**Melieana Putri**

**NPM: 16 04 22459**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Nuritomo., S.E., M.Acc.**

**Abstrak**

Pelaksanaan desentralisasi pada otonomi daerah menyebabkan permasalahan politik dinasti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait perbedaan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun tanpa politik dinasti. Kinerja pemda pada penelitian diukur menggunakan EKPPD dan IPM. Sementara, akuntabilitas diukur dengan opini BPK RI. Penelitian menggunakan data periode 2012-2017. Penelitian menggunakan *matched sample* dan dilakukan uji beda *Mann Whitney*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan EKPPD dan IPM pada pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan tanpa politik dinasti. Selain itu penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan akuntabilitas antara pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun tanpa politik dinasti.

**Keyword: Politik Dinasti, Kinerja Pemda, EKPPD, IPM, Akuntabilitas**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Di masa Reformasi 1998, ada transformasi rezim orde baru ke reformasi. Sejak masa reformasi hingga sekarang, pemerintah memiliki wewenang dalam menjalankan pemerintahannya berdasar UU No. 23/2014 Pasal 1(6). Adanya otonomi daerah mendorong perubahan sistem politik dimana sebagian urusan dan kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan pada kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat setempat. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan daerah yang demokratis dengan maksud pelaksanaan kerja pemerintah lebih optimal dan bertanggungjawab pada rakyat yang telah memberinya amanah untuk memimpin daerah mereka.

Pembentukan otonomi daerah bermaksud menumbuhkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah (pemda) sehingga *good governance* dapat tercapai (Silitonga, dkk, 2020). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemda perlu melakukan penilaian kinerja baik dari segi keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui keberhasilan dalam pencapaian tujuan pemda. Penyelenggaraan otonomi daerah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 menyebutkan jika LPPD memerlukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) serta informasi pelengkap seperti laporan pertanggungjawaban APBN, informasi keuangan daerah dan

laporan kinerja instansi pemda. Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Pemingkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemda yang baik dapat tercipta dengan keuangan daerah yang dikelola baik sesuai tujuan pemda sehingga dapat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Dalam mengetahui keberhasilan pencapaian pembangunan suatu daerah mampu mempengaruhi sekaligus membangun kualitas hidup masyarakatnya, maka diperlukan pengukuran dari segi non keuangan salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran kinerja pemerintah dan alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM mampu mengukur level pembangunan serta menjelaskan hasil pembangunan pemda melalui kesehatan, edukasi, pendapatan, dan lainnya. Bentuk pertanggungjawaban pada publik atas kegiatan yang dilakukan merupakan wujud akuntabilitas (Mahsun, dkk, 2015). Pertanggungjawaban melalui pelaporan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) guna memastikan jika dana masyarakat dikelola sesuai dengan tujuan yang dicapai. Penilaian BPK dalam bentuk opini audit terhadap laporan keuangan pemda akan digunakan sebagai ukuran akuntabilitas dalam penelitian ini.

Memasuki otonomi daerah, pelaksanaan pemerintahan menjadi desentralisasi menimbulkan permasalahan baru yaitu politik dinasti. Politik dinasti dipahami sebagai kelompok orang yang memiliki ikatan keluarga yang menjalankan kekuasaan perpolitikan (Nurdjan & Minarwati, 2019). Akhir-akhir ini publik diriuhan dengan isu politik dinasti yang akan dibangun Jokowi-Ma'ruf Amin (Presiden-Wakil Presiden 2019-2024). Hal ini terjadi lantaran terdapat 4 anggota

keluarga Jokowi bakal maju Pilkada 2020. Dikutip dari Kompas.com (13Juni 2020), Gibran Rakabuming Raka (Putra Sulung) maju dalam Pemilihan Wali Kota Solo 2020, Bobby Nasution (menantu) maju dalam Pilkada Wali Kota Medan 2020, Wahyu Purwanto (adik ipar) mencalonkan diri sebagai Bupati Gunungkidul, dan Doli Sinomba Siregar (paman dari menantu) bakal calon Bupati Tapanuli Selatan. Dari pihak Ma'ruf Amin terdapat putrinya (Siti Nur Azizah) yang bakal maju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran publik akan politik dinasti yang dibangun yang nantinya dapat mempengaruhi *checks and balances* pemerintahan dan kemudian mengarah pada praktik korupsi.

Majalah.tempo.co (15 Juni 2020), menjelaskan faktor politik dinasti yang makin menjamur dipengaruhi oleh tidak adanya aturan yang membatasi, institusional partai politik yang lemah, penyalahgunaan kekuasaan guna memenangkan anggota keluarga mereka dalam pemilihan, dan beberapa pihak menganggap politik dinasti tidak menjadi masalah. Politik dinasti menjadi suatu ancaman karena menyebabkan tidak terpilihnya pemimpin yang potensial. Dilansir dari nasional.sindonews.com (13Juni 2020), Yenny Sucipto (Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menyatakan jika pelaku praktik politik dinasti yang luas cenderung berperilaku korup dan menyalahgunakan wewenangnya.

Penelitian politik dinasti terhadap kinerja dan akuntabilitas pemda di Indonesia mengacu pada beberapa jurnal penelitian terdahulu. Penelitian Pratolo & Irmawati (2020) merumuskan jika kinerja berdampak pada akuntabilitas

laporan keuangan pemda dan politik dinasti tidak berdampak pada akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. Penelitian Nuritomo, & Rossieta (2014) merumuskan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif pada akuntabilitas laporan keuangan sedangkan tidak berpengaruh pada kinerja pemda. Selain itu hasil penelitian mengungkapkan jika sistem pengendalian internal mampu memperkecil dampak negatif politik dinasti. Aji & Pratolo (2018) menemukan praktik politik dinasti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda sedangkan SPI berpengaruh pada kinerja pemda. Disamping itu penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memediasi antara politik dinasti dan SPI pada kinerja pemda. Setyaningrum & Saragih (2019) menemukan dinasti politik berpengaruh negatif pada kinerja pemda. Pengaruh politik dinasti pada kinerja dapat dikurangi dengan tata kelola pemerintahan. Asako, dkk (2010) menemukan politik dinasti berdampak negatif pada demokrasi. Selain itu kinerja ekonomi rendah padahal sumber daya yang dimiliki melimpah.

Republika.co.id (13 Juni 2020), Akbar Fauzal Direktur Eksekutif Nagara Institute menyatakan bahwa sebanyak 86 kepala daerah terdampak melakukan dinasti politik dalam pilkada 2015, 2017 dan 2018. Dalam 3 kali pilkada serentak ada 14,78% atau sekitar 80 wilayah terdampak dinasti politik.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu serta fenomena yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi penelitian terhadap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang mengalami politik dinasti dengan rentang tahun penelitian yang diperluas. Selanjutnya, judul penelitian ini adalah **“Perbedaan Kinerja dan**



## **Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terlibat Politik Dinasti dan Tanpa Politik Dinasti di Indonesia Tahun 2012-2017.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan masalah yang diungkapkan terlebih dahulu, beberapa rumusan penelitian yang bisa dibentuk adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan EKPPD pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan pemda kabupaten/kota tanpa politik dinasti?
2. Apakah terdapat perbedaan IPM pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan pemda kabupaten/kota tanpa politik dinasti?
3. Apakah terdapat perbedaan akuntabilitas pemda kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan pemda kabupaten/kota tanpa politik dinasti?

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah penelitian diperlukan supaya mencapai hasil penelitian konsisten dan fokus ke tujuan. Penelitian fokus pada politik dinasti pada level eksekutif yaitu kepala daerah yang memiliki ikatan keluarga sedarah ataupun semenda yang menempati posisi di daerah yang sama ataupun daerah yang berbeda.

#### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan guna memberikan bukti empiris mengenai perbedaan kinerja yang dinilai dengan EKPPD dan IPM serta perbedaan akuntabilitas antara pemda yang terlibat politik dinasti dan pemda tanpa politik dinasti.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

##### 1. Kontribusi Teori

###### a. Bagi Peneliti

Perolehan hasil bisa dijadikan pengetahuan perbedaan kinerja dan akuntabilitas terkait pemda yang terlibat politik dinasti dan tanpa politik dinasti. Bagi penelitian selanjutnya, hal ini bisa dijadikan referensi baru.

###### b. Bagi Pembaca

Hasil yang diperoleh dari penelitian mampu memberikan wawasan pembaca mengenai perbedaan kinerja dan akuntabilitas antara pemda yang terlibat politik dinasti dan tanpa politik dinasti.

##### 2. Kontribusi Praktik

###### a. Bagi Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia

Penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk membentuk aturan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemda di seluruh Indonesia sehingga mampu menciptakan kinerja dan akuntabilitas pemda yang baik.

b. Pihak Masyarakat

Penelitian mampu menginformasi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemda Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar dapat memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung demi terwujudnya kesejahteraan.

### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Agar arah pembahasan dapat dimengerti dan dipahami maka dibuatlah sistematika ini:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Penjabaran permasalahan riset, perumusan permasalahan, serta batas permasalahan tentang politik dinasti, kinerja dan akuntabilitas pemda. Diuraikan pula manfaat, tujuannya riset serta sistematik pembahasannya.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Uraian konsep tentang politik dinasti, kinerja pemda, dan akuntabilitas pemda yang selanjutnya dipakai sebagai landasan analisis masalah serta konteks pemikiran riset.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Mencakup objek serta lokasi, populasi serta sampel, jenis serta teknik mengumpulkan data, pendefinisian operasionalisasi variabel beserta teknik penganalisan data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum objek penelitian yaitu kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun kabupaten/kota tanpa politik dinasti. Selanjutnya dilakukan penjabaran dan analisis hasil Uji *Mann Whitney* terkait perbedaan kinerja yang dinilai dengan EKPPD dan IPM serta perbedaan akuntabilitas antara kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti maupun tanpa politik dinasti.

#### BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan saran dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perbedaan kinerja pemda dan akuntabilitas kabupaten/kota yang terlibat politik dinasti dan kabupaten/kota tanpa politik dinasti. Kinerja pemda diukur melalui 2 aspek yaitu skor EKPPD (keuangan) dan IPM (non-keuangan), sedangkan akuntabilitas diukur dengan opini BPK RI. Hasil pengujian dengan uji beda *Mann Whitney* menunjukkan: (1) tidak ada perbedaan EKPPD antara pemda berpolitik dinasti dengan pemda tanpa politik dinasti, (2) tidak ada perbedaan IPM antara pemda berpolitik dinasti dengan pemda tanpa politik dinasti, dan (3) tidak ada perbedaan akuntabilitas antara pemda berpolitik dinasti dengan pemda tanpa politik dinasti.

#### **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan tak lepas dari keterbatasan yakni pencarian sampel data politik dinasti dilaksanakan manual dengan *matched sample* yang berpotensi *self selection bias*. Guna mengatasinya, maka digunakan total aset dan total pendapatan untuk memperoleh sampel politik dinasti. Disamping itu, terbatasnya akses data EKPPD menyebabkan penelitian hanya dilakukan pada periode 2012-2017.

### 5.3. Saran

Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran variabel kinerja pemda dan akuntabilitas pemda dengan proksi lainnya serta memperluas variabel politik dinasti menjadi level legislatif sehingga dapat diketahui dampak lainnya. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan pengaruh APIP pada politik dinasti.



## DAFAR PUSTAKA

- Aji, T. S. W., S. Pratolo. (2018). Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012-2015. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol. 1 No. 2*.
- Asako, Y., T.Iida, T.Matsubayashi & M.Ueda. (2010). Dynastic Legislators: Theory And Evidence From Japan. *Working Papers*. Waseda University Organization for Japan-US Studies.
- Ahyaruddin, M., R. Akbar. (2016). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional. *Prosiding 1th Celscitech - UMRI Vol.1*.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Feinstein, B. D. (2010). The Dynasty Advantage: Family Ties in Congressional Elections. *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 35 No. 4.
- Gudono. (2009). *Teori Organisasi*. Sleman, Indonesia: Pensil Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate: dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Indonesia: Undip
- Haboddin, M. (2015). *Politik Primordialisme: dalam Pemilu di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia: BPFPE.
- Heryanto, G.G. (2019). *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Dmeokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, H. A.Purwanugraha. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.
- Nurdjan, S., & Minarwati. (2019). *Tabir Keadilan: Kumpulan Esai Hukum Populer dan Politik Indonesia*. Sulawesi Selatan: Aksara Timur.
- Nuritomo, H. Rossieta. (2014). Politik Dinasti, Akuntabilitas, Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium XVII Lombok*.
- Pratolo ,S., F.D Irmawati ., (2020). Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Vol. 30 No. 3*.
- Setyaningrum, D., H. A. Saragih. (2019). Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 8 No. 2.
- Sarwono, J., & H. Budiono. (2012). *Statistik Terapan: Aplikasi untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.



Silitonga, H.P., D.C. Sari, R.T. Siregar, M. Silalahi, M. Butarbutar, H.V. Alam, A.Z. Abidin, Falimu, A. Rahmat. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Zamzam, F. (2015). *Good Governance Sekretariat DPRD*. Yogyakarta: CV Budi Utama.



## REFERENSI

- Biem.co. (2020). IPM Terus Meningkatkan, Bupati Serang Terbukti Berprestasi. Diperoleh 17 Desember 2020, dari <https://www.biem.co/read/2018/10/07/28337/ipm-terus-meningkat-bupati-serang-terbukti-berprestasi/>
- bps.go.id. (2020). Indeks Pembangunan Manusia. Diperoleh 13 Juni 2020, dari <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Harianbangsa.net. (2020). Pemkab Mijokerto Raih Status Kinerja Sangat Tinggi. Diperoleh 17 Desember 2020, dari <https://harianbangsa.net/pemkab-mojokerto-raih-status-kinerja-sangat-tinggi>
- Kabarbanten.com. (2020). Tingkatkan Inovasi untuk Pelayanan Publik, Pemkab Serang Perpanjang MoU dengan LAN . Diperoleh 17 Desember 2020, dari <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/serang/pr-59615350/tingkatkan-inovasi-untuk-pelayanan-publik-pemkab-serang-perpanjang-mou-dengan-lan>
- Kompas.com. (2020). 100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik. Diperoleh 13 Juni 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/03/09111511/100-hari-jokowi-maruf-eksperimen-membangun-dinasti-politik?page=1>

Mediaindonesia.com. (2020). Buruk, Kinerja Tiga OPD Kota Bandung. Diperoleh 17 Desember 2020, dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/106795/buruk-kinerja-tiga-opd-kota>

mkri.id. (2020). Politik Dinasti. Diperoleh 13 Juni 2020, dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428>

Majalah.tempo.co (2020). Kuasa Dalam Cengkeraman Keluarga. Diperoleh 15 Juni 2020, dari <https://majalah.tempo.co/read/kolom/160696/kolom-mengapa-dinasti-politik-tumbuh-subur-di-indonesia?hidden=login>

Nasional.sindonews.com. (2018). Politik Dinasti Masih Warnai Pilkada 2018. Diperoleh 13 Juni 2020, dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1287909/12/politik-dinasti-masih-warnai-pilkada-2018>

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Diakses dari <http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/432/permendagri-no-13-tahun-2006> tanggal 30 November 2018).

Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Diakses dari <http://www.asdeksi.org/asdek03/?p=853> tanggal 30 November 2018).

Permendagri No. 73 Tahun 2009 tentang *Tatacara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Diakses dari [http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri2009\\_73.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri2009_73.pdf) tanggal 8 Maret 2020).

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat*. (Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4723> tanggal 8 Maret 2020)

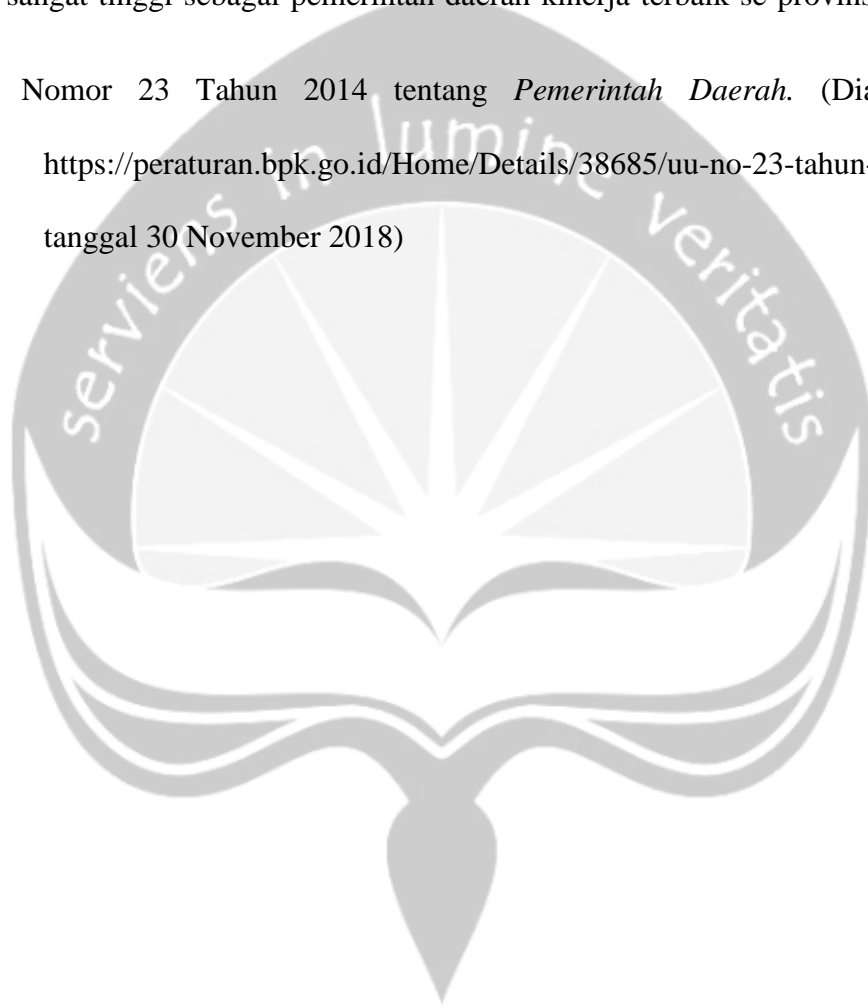
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/6TAHUN2008PP.HTM>)

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5832/pp-no-12-tahun-2017>)

Republika.co.id (2020). Nagara Institute: 86 Kepala Daerah Terpapar Dinasti Politik. Diperoleh 13 Juni 2020, dari <https://republika.co.id/berita/nasional/politik/q5udoj384/nagara-institute-86-kepala-daerah-terpapar-dinasti-politik>

Tangerangkota.go.id. (2020). Pemkot Raih Predikat Sangat Tinggi Sebagai Pemerintah Daerah Kinerja Terbaik se-Provinsi Banten. Diperoleh 17 Desember 2020, dari <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/24497/pemkot-raih-predikat-sangat-tinggi-sebagai-pemerintah-daerah-kinerja-terbaik-se-provinsi-banten>

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. (Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> tanggal 30 November 2018)



## LAMPIRAN

### HASIL PENGUJIAN SPSS

#### 1. Hasil Uji Normalitas

##### Tests of Normality

	Politik Dinasti	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statisti c	df	Sig.	Statisti c	df	Sig.
EKPPD Pemda	Non Dinasti	,179	210	,000	,831	210	,000
	Dinasti	,120	210	,000	,894	210	,000

a. Lilliefors Significance Correction

##### Tests of Normality

	Politik Dinasti	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statisti c	df	Sig.	Statisti c	df	Sig.
IPM Pemda	Non Dinasti	,076	210	,005	,969	210	,000
	Dinasti	,104	210	,000	,959	210	,000

a. Lilliefors Significance Correction

##### Tests of Normality

	Politik Dinasti	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
		Statisti c	df	Sig.	Statisti c	df	Sig.
Akuntabilitas Pemda	Non Dinasti	,328	210	,000	,728	210	,000
	Dinasti	,282	210	,000	,758	210	,000

a. Lilliefors Significance Correction

2. Hasil Uji *Mann Whitney***Test Statisticsa**

	EKPPD Pemda
Mann-Whitney U	20362,000
Wilcoxon W	42517,000
Z	-1,357
Asymp. Sig. (2-tailed)	,175

a. Grouping Variable: Politik  
Dinasti

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	IPM Pemda
Mann-Whitney U	21444,000
Wilcoxon W	43599,000
Z	-,487
Asymp. Sig. (2-tailed)	,626

a. Grouping Variable: Politik  
Dinasti

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Akuntabilitas Pemda
Mann-Whitney U	20263,500
Wilcoxon W	42418,500
Z	-1,589
Asymp. Sig. (2-tailed)	,112

a. Grouping Variable: Politik  
Dinasti